LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH

KABUPATEN KUTAI TIMUR

TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. LKjIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Penyusunan LKjIP Tahun 2025 tetap mengupayakan optimalisasi capaian target kinerja yang telah diperjanjikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Sangatta, Januari 2026
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah

Julansyah, S.Hut
NIP 197307092001211001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iv

DAFTAR GAMBAR v

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Penjelasan Umum Organisasi 2

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja 3

1.2.2 Anggaran 4

1.3 Dasar Hukum 4

1.4 Sistematika Laporan Kinerja 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA 7

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah 7

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2020 8

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 8

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 17

3.1 Capaian Kinerja 17

3.1.1 Skala Capaian Kinerja 18

3.1.2 Membandingkan Antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan 18

3.1.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir 19

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun Ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi 20

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan 23

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 24

3.1.7 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja 25

3.2 Realisasi Anggaran 28

BAB IV PENUTUP 36
LAMPIRAN 37

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025 4
Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis 7
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025 8
Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025 9
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 10
Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 11
Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja 18
Tabel 3.2 Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2025 18
Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja 20
Tabel 3.4 Komparasi Capaian Sasaran Strategis 21
Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi 23
Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran 24
Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan 25
Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan 29

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Susunan Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kota Timur 4

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut dituangkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan *(disclosure)* secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut maka Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKIP).

Penyusunan LKIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2026 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang berupa kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

1.2 Penjelasan Umum Organisasi

1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

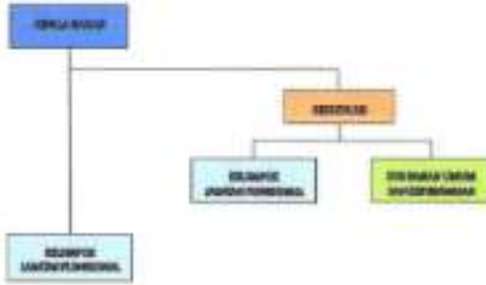
Sejak diberlakukannya Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 berdampak Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah digant dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 5 Tahun 2022 terbentuk Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur yang merupakan supporting unit penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Struktur organisasi dan tata kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kabupaten Kutai Timur berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tugas BRIDA membantu Bupati dalam:
   a. melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inventasi dan inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan;
   b. melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan penguasan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan Pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
2. Dalam melaksanakan tugas tersebut Badan Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:
   a. pelaksanaan kebijakan, teknis, dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta inventasi dan inovasi di daerah yang mendukung fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan Pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;

b. penyusunan perencanaan program, anggaran, kelembagaan, dan sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta inversi dan inovasi di daerah yang pedoman pada nilai Pancasila;
c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta inversi dan inovasi di daerah;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta inversi dan inovasi di daerah;
e. pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan serta inversi dan inovasi di daerah;
f. pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
g. koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah;
h. pelaksanaan administrasi badan; dan
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

3. Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, disusunlah bagan susunan organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah di bawah ini.



Sumber: Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 27 Tahun 2024

Gambar 1.1
Susunan Organisasi Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur

1.2.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah pada tahun 2024 dan 2025 bahwa anggaran tahun 2025 lebih rendah dari APBD Tahun 2024.

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2024 dan Tahun 2025

Sumber	Tahun	Jumlah
(1)	(2)	(3)
APBD 2024	Tahun n-1	Rp 24.468.906.255
APBD 2025	Tahun n	Rp 15.269.472.599
Sumber Lainnya (Jika Ada)		Rp 0

Sumber :
- *DPPA Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2024*
- *DPPA Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025*
- *Data olah*

1.3 Dasar Hukum

Laporan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Timur.
7. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.
8. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 37 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issues*) yang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi dibandingkan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

3.2 Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Lain-lain yang dianggap perlu.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Tujuan Badan Riset dan Inovasi Daerah adalah Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel. Lebih jelasnya, indikator kinerja dan target kinerja tujuan dan sasaran Badan Riset dan Inovasi Daerah mulai tahun 2021 s.d. 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1. Adapun Indikator Kinerja Utama Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 pada Tabel 2.2.

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Target Kinerja Pada Tahun				
					2021	2022	2023	2024	2025
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.A.11	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel			Nilai Akuntabilitas Kinerja	81,50	81,80	82,00	82,25	82,50
		1.A.11.1	Terwujudnya Koordinasi dan Tata Kelola Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi dan Tata Kelola Perkantoran	18	18	16	17	17
		1.A.11.2	Terwujudnya Kolaborasi Penyelenggaraan Daerah yang memenuhi standar dan sesuai kebutuhan	Jumlah produk kolaborasi	16	16	16	15	15

Sumber: Rencana Badan Riset dan Inovasi Daerah Periode 2021-2026 (data diolah)

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Tujuan Daerah Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)
1.4.11.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	1.4.11.A.1	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Nilai	Capaian pelaksanaan tata kelola pemerintahan	Evaluasi atas perencanaan kerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan akuntabilitas kinerja internal	Penilaian Inspektorat
1.4.11.1	Terwujudnya Koordinasi dan Tata Kelola Administrasi Pemerintahan	1.A.11.1.01	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi dan Tata Kelola Pemerintahan	Dokumen	Penjumlahan seluruh pelaksanaan kegiatan di Sekretariat	Jumlah dokumen kegiatan 1 + 2 + ... dst.	Kelurahan dokumen yang dihasilkan di Sekretariat
1.4.11.2	Terpenuhinya Ketiibangan Penyelenggaraan Daerah yang memenuhi standar dan sesuai ketentuan	1.4.11.2d.0.2	Jumlah produk ketiibangan	dokumen	Hasil ketiibangan yang dilaksanakan	Penjumlahan hasil seluruh kegiatan ketiibangan (ketiibang 1 + 2 + 3 + 4)	Hasil dokumen Bidang

Sumber: Indikator Kinerja Utama Kedua Kuantitatif (Inovasi) Daerah Tahun 2020 (data diolah)

2.2 Rencana Kinerja Tahun 2025

Rencana Kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2025 termuat dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1.4.11	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel			Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP)	nilai	82,5
		1.4.11.1	Terpenuhinya Koordinasi dan Tata Kelola Administrasi Perbatasan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi dan Tata Kelola Perbatasan	dokumen	17
		1.4.11.2	Terpenuhinya Keilmuan Penyelenggaraan Daerah yang memenuhi standar dan sesuai kebutuhan	Jumlah produk keilmuan	dokumen	6

Sumber: Rencana Kerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 (data diolah)

Nilai Akuntabilitas Kinerja (SAKIP) diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan Inspektorat Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan Surat Inspektorat Kabupaten Kutai Timur Nomor: 700.1.2.1/268/ITKAB.IR1, Perihal: Laporan Hasil Evaluasi AKIP pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2024 tanggal 6 Mei 2025 bahwa hasil evaluasi atas implementasi Sistem AKIP pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 82,20 (Enam Puluh Dua koma Dua Puluh) atau dengan predikat penilaian B (Baik).

2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna

untuk menyusun prioritas kegiatan yang didanai dari sumber dana yang terbatas. Dengan penerapan sistem kinerja tersebut diharapkan fokus dalam merancanakan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak tepat sasaran. Adapun Perjanjian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.4.

Tabel 3.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.11.1	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	42,8
1.4.11.2	Terpenuhinya Kelengkapan Penyelenggaraan Daerah yang memenuhi standar dan sesuai kebutuhan	Jumlah perdok kelengkapan	0 dokumen
1.4.11.3	Terpenuhinya koordinasi dan tata Kerja Administrasi Pemerintah	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan tata Kerja administrasi pemerintah	17 dokumen

Sumber: Perjanjian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 (data diolah)

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang telah ditetapkan. Pada DPPA Tahun Anggaran 2025 terdapat 5 (lima) Sub Kegiatan dilakukan efisiensi anggaran dan penyesuaian sub kegiatan sehingga terjadinya disclaim. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 2.5.

Tabel 2.5 Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan
Perangkat Daerah Tahun 2025

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.A.11. 1.2	PROGRAM PEMBINAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100 %
1.A.11. 1.2.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 dokumen
1.A.11. 1.2.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen
1.A.11. 1.2.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0
1.A.11. 1.2.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0
1.A.11. 1.2.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	1 laporan

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1.4.11. 1.2.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0
1.4.11. 1.3.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Kantor**	**2 laporan**
1.4.11. 1.2.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang
1.4.11. 1.2.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 dokumen
1.4.11. 1.2.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Evaluasi Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	0
1.4.11. 1.2.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian**	**1 laporan**
1.4.11. 1.2.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0 orang

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.11. 1.2.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**Jumlah Laporan Administrasi Umum Kantor**	**5 laporan**
1.4.11. 1.2.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 paket
1.4.11. 1.2.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 paket
1.4.11. 1.2.4.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 laporan
1.4.11. 1.2.4.4	Penatausahaan Aset Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Aset Dinamis pada SKPD	1 dokumen
1.4.11. 1.2.4.5	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 dokumen
1.4.11. 1.2.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah dokumen pengadaan barang milik daerah**	**2 dokumen**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	4 unit
1.4.11. 1.2.5.1	**Pengadaan Mobil**	Jumlah Paket Mobil yang Disediakan	0

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.4.11. 1.2.0.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Diadakan	14 unit
1.4.11. 1.2.6	Pengadaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3 laporan
1.4.11. 1.2.6.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1 laporan
1.4.11. 1.2.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan
1.4.11. 1.2.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1 dokumen
1.4.11. 1.2.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	7 unit
1.4.11. 2.1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	13,64 %
1.4.11. 2.1.1	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan	Jumlah dokumen Penelitian dan	1 dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
	Pemmbinaan dan Pengkajian Peraturan	Pengoordinasian Bidang Penyelenggaraan Perundang-undangan dan Pengkajian Peraturan	
1.4.11. 2.1.1.1	Penyusunan Rekomendasi atas Rancana Penetapan Peraturan Baru daerah, Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Jumlah rekomendasi Penyusunan Rekomendasi atas Rancana Penetapan Peraturan Baru daerah, Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	1 rekomendasi
1.4.11. 2.1.2	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 dokumen
1.4.11. 2.1.2.1	Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1 dokumen
1.4.11. 2.1.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 dokumen
1.4.11. 2.1.3.1	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian,	1 dokumen

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Perkebunan dan Pangan	
1.4.11. 2.1.5.2	Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	2 dokumen
1.4.11. 2.1.4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	2 dokumen
1.4.11. 2.1.4.1	Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 dokumen
1.4.11. 2.1.4.3	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 laporan

Sumber: DPPA Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 (data diolah)

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dan perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara berkaitan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Badan Riset dan Inovasi Daerah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikonversikan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan penunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	91 ≤ 100
2	Tinggi	76 ≤ 90
3	Sedang	66 ≤ 75
4	Rendah	51 ≤ 65
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2017*

3.1.2 Membandingkan antara Target dan Realisasi Tahun Pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah tahun 2025 antara target dan realisasi dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.A. 11	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP	62,5				
1.A. 11.1	Terpenuhinya Koordinasi dan Tata Kelola Administrasi Perkantoran	Jumlah Dokumen Pelaporan Koordinasi dan Tata Kelola Perkantoran	17	17	100,00	Sangat Tinggi	Kelengkapan dokumen yang disusun di Sekretariat
1.A. 11.2	Terpenuhinya Kelengkapan Perangkat Daerah	Jumlah produk kelengkapan	5	6	120,00	Sangat Tinggi	Hasil Laporan Akhir penelitian

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Daerah yang Memenuhi Standar dan Sesuai Kebutuhan						dan pengembangan

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2025 (data diolah)

Sasaran strategis Terpenuhinya Koordinasi dan Tata Kelola Administrasi Perkantoran dengan indikator jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan tata kelola administrasi perkantoran sebanyak 17 dokumen direalisasi dan 17 dokumen target atau 100 % tergolong kategori Sangat Tinggi. Semua Sub Kegiatan dilaksanakan sesuai target dan tidak ada hutang.

Sasaran strategis Terpenuhinya Kelitbangan Penyelenggaraan Daerah yang Memenuhi Standar dan Sesuai Kebutuhan dengan indikator jumlah produk kelitbangan sebanyak 9 dokumen direalisasikan dari 9 dokumen target atau 100,00 % tergolong kategori Sangat Tinggi. Keluarannya, antara lain:

1. Laporan Akhir Kajian Kebijakan Strategis Daerah Program RT 230 juta per tahun;
2. Laporan Akhir Kajian Anjungan Dukcapil Mandiri di Kabupaten Kutai Timur;
3. Laporan Akhir Kajian Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur;
4. Laporan Akhir Kajian Pemanfaatan Bandara Tanjung Bara Kutai Timur;
5. Laporan Akhir Kajian Studi Kelayakan Operasionalisasi Bis Listrik Gratis bagi Pelajar Kutai Timur; dan
6. Laporan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2025-2029.

3.1.3 Membandingkan Antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau sampai tahun 2022 disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun (n-3)	Tahun (n-2)	Tahun (n-1)		Tahun (n)	
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.11	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP		54,77	62,20	62,5		
1.4.11.1	Terlaksananya Koordinasi dan Tata Kelola Administrasi Perbatasan	Jumlah Dokumen Perencanaan Koordinasi dan Tata Kelola Perbatasan	65	15	35	11	17	100,00
1.4.11.2	Terpeliharanya Kelengkapan Penyelenggaraan Daerah yang memenuhi standar dan kriteria kebutuhan	Jumlah produk kelengkapan	8	12	11	9	9	100,00

Sumber :

- *LKIP Badan Kesatuan dan Pengembangan Kabupaten Kaur Timur Tahun 2022*
- *LKIP Badan Kesatuan dan Pengembangan Kabupaten Kaur Timur Tahun 2023*
- *LKIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kaur Timur Tahun 2024*
- *Data diolah*

Keterangan

1) Kolom 4 adalah realisasi capaian kinerja pada 3 (tiga) tahun lalu atau tahun 2022
2) Kolom 5 adalah realisasi capaian kinerja pada 2 (dua) tahun lalu atau tahun 2023
3) Kolom 6 adalah realisasi capaian kinerja pada 1 (satu) tahun lalu atau tahun 2024
4) n adalah tahun perencanaan atau tahun 2025

Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dengan indikator nilai SAKIP ditargetkan sebesar 62,5, realisasinya menanggu hasil evaluasi AKIP pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun Anggaran 2025 dilakukan Inspektorat Kabupaten Kaur Timur. Pada tahun 2025, capaiannya sebesar 64,77 dengan predikat "CC" atau Cukup Memadai dan tahun 2024 sebesar 62,20 dengan predikat "B" atau Baik.

Realisasi sasaran strategis Terpenuhinya Koordinasi dan Tata Kelola Administrasi Perkantoran dengan indikator jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan tata kelola administrasi perkantoran sebesar 17 dokumen dari 17 dokumen target atau capaian 100,00 %. Jika realisasi kinerja tahun 2025 dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dan 2023 sebanyak 16 dokumen maka capaian kinerja tahun 2025 lebih banyak 1 dokumen. Sedangkan terhadap realisasi tahun 2024 sebanyak 20 dokumen maka realisasi tahun 2025 lebih sedikit 6 dokumen. Hal ini dikarenakan adanya perubahan alokasi anggaran.

Realisasi sasaran strategis Terpenuhinya Kelitbangan Penyelenggaraan Daerah yang memenuhi standar dan sesuai kebutuhan dengan indikator jumlah produk kelitbangan sebesar 6 dokumen dari 6 dokumen target atau 100,00 %. Jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 sebanyak 5 dokumen atau lebih banyak banyak 1 dokumen, realisasi tahun 2023 sebanyak 12 dokumen atau lebih banyak 6 dokumen, dan realisasi tahun 2024 sebanyak 11 dokumen atau lebih sedikit 5 dokumen. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan alokasi anggaran.

3.1.4 Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2025 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Badan Riset dan Inovasi Daerah periode 2021-2026 dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun ini	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100
1.4.11	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP			
1.4.11.1	Terpenuhinya Koordinasi dan Tata Kelola	Jumlah Dokumen Pelaksanaan	17	43	107,32

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun a	Target Akhir Renstra Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =(4/5*100
	Administrasi Perkantoran	Koordinasi dan Tata Kelola Perkantoran			
14. 11.3	Terwujudnya Kelitbangan Penyelenggaraan Daerah yang Memenuhi Standar dan Sesuai Kebutuhan	Jumlah produk kelitbangan	6	80	62,50

Sumber :

- *Renstra Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025*
- *Pedoman Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025*
- Data diolah

Uraian penjelasan tabel di atas dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Sasaran Terpenuhinya Koordinasi dan Tata Kelola Administrasi Perkantoran dengan indikator kinerja Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi dan Tata Kelola Perkantoran pada tahun 2025 sebanyak 17 dokumen/laporan terhadap target akhir Renstra sebanyak 82 dokumen/laporan. Jika capaiannya sampai tahun 2024 sebanyak 71 dokumen/laporan dan capaian tahun 2025 sebanyak 17 dokumen/laporan. Sehingga tingkat kemajuannya sampai tahun 2025 sebanyak 88 dokumen/laporan dibagi 82 dokumen/laporan target akhir Renstra dikali 100 yaitu 107,32. Capaian ini melewati target akhir Renstra.
2. Sasaran Terpenuhinya Kelitbangan Penyelenggaraan Daerah yang Memenuhi Standar dan Sesuai Kebutuhan dengan realisasi indikator kinerja Jumlah produk kelitbangan pada tahun 2025 sebanyak 6 dokumen/laporan. Jika capaiannya sampai tahun 2024 sebanyak 44 dokumen/laporan dan capaian pada tahun 2025 sebanyak 6 dokumen/laporan. Sehingga tingkat kemajuannya sampai tahun 2025 sebanyak 50 dokumen/laporan dibagi 80 dokumen/laporan target akhir Renstra dikali 100 yaitu 62,50. Hal ini perlu upaya keras untuk mewujudkan sasaran strategis ini.

3.1.5 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No.	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
3.4. 11	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabilitas	Nilai SAKIP	62,5				
3.4. 11.1	Terpenuhinya Koordinasi dan Tata Kelola Administrasi Pemerintah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi dan Tata Kelola Pemerintah	17	17	100,00	Adanya arahan pimpinan dalam pelaksanaan	Dilaksanakan rapat pengarahan
3.4. 11.2	Terpenuhinya Kelengkapan Penyelenggaraan Daerah yang memenuhi standar dan mutu kebutuhan	Jumlah produk kelengkapan	6	6	100,00	Adanya asistensi pimpinan dan koordinasi internal dengan stakeholder	Rapat penganalisaan dan koordinasi dengan Tim Evaluasi

Sumber : Perjanjian Kinerja Badan Aset dan Keuasi Daerah Tahun 2020 (data diolah)

3.1.6 Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Analisis atas efisiensi atas penggunaan sumber daya dapat dilihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp.)	Realisasi (Rp.)	% Capaian	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.4.11	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	82,5			18.268.472.589	16.888.794.694	87,65	-
1.4.11.1	Terperuntuknya Koordinasi dan Tata Kelola Administrasi Perkantoran	17	23	100,00	11.572.282.909	9.697.997.953	83,31	14,69 % atau 1,10 Kategori Efisien
1.4.11.2	Terperuntuknya Kelengkapan Penyelenggaraan Daerah yang memenuhi standar dan sesuai kebutuhan	6	6	100,00	6.697.413.800	5.485.112.048	83,24	4,76 % atau 1,05 Kategori Efisien

Sumber:

- Perjanjian Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2023
- LKIA Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2023
- Data Olah

Uraian penjelasan tabel di atas dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Efisiensi dari Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel belum dapat dihitung dikarenakan belum ada penilaian atas indikator kinerja meski capaian keuangan sebesar 87,65 %
2. Realisasi Sasaran Terperuntuknya Koordinasi dan Tata Kelola Administrasi Perkantoran sebesar 17 dari target 17 atau 100 % dengan capaian keuangan sebesar 83,31 % diperoleh efisiensi sebesar 14,69 % atau 1,10 dalam kategori Efisien.

3. Realisasi Belanja Terpenuhinya Kelengkapan Penyelenggaraan Daerah sebesar 11 dari target 9 atau 100,00 % dengan capaian keuangan sebesar 95,24 % diperoleh efisiensi sebesar 4,76 % atau 1,06 dalam kategori Efisien.

3.1.1 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja dapat dilihat pada Tabel 3.7.

Tabel 3.7 Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4.11	Meningkatnya Tata Pelaku Pemerintahan yang Akuntabel	Nilai SAKIP					
1.4.11.1	Terpenuhinya Koordinasi dan Tata Pelaku Administrasi Pemerintah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Koordinasi dan Tata Kerja Pemerintah	100,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan	100,00	Menunjang
1.4.11.1.1				Perencanaan, Pengenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penggenggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00	Menunjang
1.4.11.1.2				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Kantor	100,00	Menunjang
1.4.11.1.3				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Kepegawaian	100,00	Menunjang
1.4.11.1.4				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Kantor	100,00	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Mendukung/ Tidak Mendukung
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.4. 11.1. 3.6				Pengelolaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pengelolaan barang milik daerah	100,00	Menunjang
1.4. 11.1. 3.8				Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	Menunjang
1.4. 11.1. 3.7				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100,00	Menunjang
1.4. 11.2. 1	Terpenuhinya kelengkapan Penyelenggaraan Daerah yang memenuhi standar dan sesuai ketentuan	Jumlah produk kelengkapan	8	PROGRAM PENGELOLAAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Implementasi Rencana Kelengkapan	10,00	Menunjang
1.4. 11.2. 1.1				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Perdesaan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Perdesaan	100,00	Menunjang
1.4. 11.2. 1.2				Penelitian dan Pengembangan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan	100,00	Menunjang

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				Bidang Sosial dan Kependudukan	Bidang Sosial dan Kependudukan		
1.0 112. 1.3				Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	100,00	Menunjang
1.0 112. 1.4				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	100,00	Menunjang

Sumber : Perjanjian Kinerja Jabatan Pimpinan dan Inovasi Daerah Tahun 2020 (data diolah)

Uraian penjelasan tabel di atas dapat disampaikan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan Indikator Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Laporan Keuangan, capaiannya sebesar 100 %. Secara umum capaian kegiatannya yaitu menunjang dengan analisanya dapat dilaksanakan dan terbayarkan.
2. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH dengan indikator Persentase Implementasi Rencana Kolitbangan, capaiannya sebesar 18,04 % dari target 18,04 % atau 100 %. Hal ini dikarenakan semua target dapat dilaksanakan dan tidak terdapat hutang. Uraian detail analisa keberhasilan Sub Kegiatan sebagai berikut:

Uraian	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
Sub Kegiatan Penyusunan Rekomendasi atas Rencana Penelitian Perumusan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Adanya sinkronisasi dan koordinasi internal dengan instansi sektor	Koordinasi dengan Tim Evaluasi	Laporan Akhir Kajian Kebijakan Strategis Daerah Program RT 350 judul/tahun
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Diadakannya rapat/pertemuan koordinasi dalam pelaksanaan	Mengadakan koordinasi lintas OPD melalui forum bidang atau	Laporan Akhir Kajian Anjuran Dukcapil Manfaat

Uraian	Faktor Pendorong	Tindak Lanjut	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)
	proses kajian menilai penyediaan data, partisipasi dalam diskusi teknis	ke pendanaan ADM	
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Pangan	Adanya pimpinan dan koordinasi internal dengan stakeholder	Koordinasi dengan Tim Swakelola	Laporan Akhir Kajian Kesehatan Pangan Kabupaten Kutai Timur
Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Perkebunan	Adanya Kepala Daerah dan koordinasi internal dengan stakeholder	Koordinasi dengan Tim Swakelola	Laporan Akhir Kajian Pemanfaatan Bandara Tanjung Bara Kutai Timur
			Laporan Akhir Kajian Studi Kelayakan Diversifikasi Ela Lemhi Ubatis baji Petajer Kutai Timur
Sub Kegiatan Penelitian, Pengembangan dan Pemanfaatan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Adanya Perpres 78 Tahun 2021, PerBRIN 6 tahun 2023, Perbup 27 Tahun 2024 SOTK BRIDA, dan rencangan 2 Tahun 2025 serta pembentukan BRIN;	Konsolidasi dan sinkronisasi Program Perangkat Daerah	Laporan Rencana Induk dan Peta Jalan Pemajuan IPTEK
	Arahan Kemendagri dalam Negeri dalam peningkatan IKI dan komitmen Tim Penguatan IKI BRIDA	Peningkatan koordinasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah	Capaian Skor IKI Tahun 2025 sebesar 48,88 dengan kategori INOVATIF sebelumnya tahun 2024 sebesar 24,75
Sub Kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antarwilayah, Internasional	Komitmen antara Pemerintah, Swasta dan Komunitas sudah baik	*Reach out* pada pelaku UMKM	Target 100 merek dengan capaian 100 merek dan target 25 Opia dengan capaian 20 Opia
	Adanya kolaborasi antara universitas dalam dan luar negeri, Program MBKM	Evaluasi penyusunan artikel ilmiah untuk dilakukan lebih cepat	Capaian 6 artikel dari target 3 artikel

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja. Lebih jelasnya diuraikan pada Tabel 3.8.

Tabel 3.8 Capaian Anggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.11. 1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.672.062.598	9.087.991.302	86,31
1.4.11. 1.1.1	**Perencanaan, Pengangaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**173.666.801**	**173.666.102**	**66,33**
1.4.11. 1.1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	62.626.801	154.967.102	66,25
1.4.11. 1.1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	0	0	0,00
1.4.11. 1.1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	0	0	0,00
1.4.11. 1.1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	13.958.000	13.958.000	66,44
1.4.11. 1.1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	0,00
1.4.11. 1.1.2	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**9.210.787.231**	**7.693.365.211**	**83,52**
1.4.11. 1.1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.185.014.031	7.591.322.911	82,64
1.4.11. 1.1.2.3	Pelaksanaan Penatausahaan dan	151.972.400	101.972.400	100,00

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD			
1.4.11. 1.1.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	0,00
1.4.11. 1.1.3	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**108.210.000**	**47.866.808**	**47,48**
1.4.11. 1.1.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	108.210.000	47.866.808	47,48
1.4.11. 1.1.4	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**	**836.170.444**	**736.407.804**	**88,07**
1.4.11. 1.1.4.1	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	165.525.000	165.525.000	100,00
1.4.11. 1.1.4.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	150.595.744	150.395.402	99,99
1.4.11. 1.1.4.3	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	512.027.200	420.797.542	81,99
1.4.11. 1.1.4.4	Pelaksanaan/Hasil Audit Internal pada SKPD	4.722.500	4.722.500	99,72
1.4.11. 1.1.4.5	Sukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	102.900.000	102.405.300	97,05
1.4.11. 1.1.5	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**901.335.270**	**867.280.400**	**87,20**
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	814.570.000	790.992.000	97,10
1.4.11. 1.1.5.1	Pengadaan Mobil	0	0	0,00
1.4.11. 1.1.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	186.765.270	186.535.400	99,74

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.4.11. 1.1.8	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**174.687.268**	**172.862.738**	**98,95**
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12.450.200	9.418.490	75,65
1.4.11. 1.1.6.2	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	153.637.268	153.464.248	99,91
1.4.11. 1.1.7	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**191.872.808**	**176.491.307**	**91,98**
1.4.11. 1.1.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	191.872.208	176.491.307	91,94
1.4.11. 2.1	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	3.297.478.208	3.429.112.942	95,84
1.4.11. 2.1.1	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengelolaan Perbatasan**	**547.866.208**	**472.429.758**	**86,23**
1.4.11. 2.1.1.3	Penyusunan Rekomendasi dan Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	547.855.208	472.429.758	86,25
1.4.11. 2.1.2	**Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan**	**626.086.208**	**630.984.598**	**99,67**
1.4.11. 2.1.2.1	Penelitian dan Pengembangan Administrasi	626.086.200	630.984.598	99,67

No.	Program/Kegiatan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
1.4.11. 2.1.3	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	1.399.467.306	1.398.195.324	99,89
1.4.11. 2.1.3.1	Penelitian dan Pengembangan Potensi, Pemasaran dan Pangan	150.074.000	149.784.637	97,93
1.4.11. 2.1.3.2	Penelitian dan Pengembangan Pertumbuhan	1.127.490.000	1.125.409.080	99,82
1.4.11. 2.1.4	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	883.632.000	483.883.547	87,39
1.4.11. 2.1.4.1	Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan di Bidang Teknologi dan Inovasi	293.952.000	281.473.031	95,55
1.4.11. 2.1.4.2	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	209.880.000	202.548.916	96,29

Sumber : LRA Aset Non Aset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 (data diolah)

Secara umum realisasi keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 sebesar Rp 10.383.704.694 dari pagu anggaran Rp 16.369.472.630 atau 87,55 %. Rincian realisasi keuangan berdasarkan program, sebagai berikut:

1. Realisasi keuangan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp 9.898.979.241 dari pagu anggaran Rp 11.572.062.599 atau 85,58 % dengan rincian sebagai berikut:
   a. Realisasi keuangan Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp 170.696.102 dari pagu anggaran Rp 173.496.561 atau 98,38 %.

b. Realisasi keuangan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar Rp 7.693.005.811 dari pagu anggaran Rp 9.210.767.201 atau 83,52 %.

c. Realisasi keuangan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp 47.580.000 dari pagu anggaran Rp 100.210.000 atau 47,48 %.

d. Realisasi keuangan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah sebesar Rp 709.457.004 dari pagu anggaran Rp 836.176.444 atau 84,82 %.

e. Realisasi keuangan Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sebesar Rp 957.260.400 dari pagu anggaran Rp 981.336.270 atau 97,55 %.

f. Realisasi keuangan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 172.902.738 dari pagu anggaran Rp 176.057.766 atau 98,19 %.

g. Realisasi keuangan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sebesar Rp 176.491.037 dari pagu anggaran Rp 191.972.000 atau 91,94 %.

2. Realisasi keuangan PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH sebesar Rp 3.428.112.942 dari pagu anggaran Rp 3.597.410.000 atau 95,24 % dengan rincianya:

a. Realisasi keuangan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan sebesar Rp 472.439.759 dari pagu anggaran Rp 547.695.000 atau 86,25 %.

b. Realisasi keuangan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan sebesar Rp 600.664.566 dari pagu anggaran Rp 606.086.000 atau 97,67 %.

c. Realisasi keuangan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebesar Rp 1.069.103.320 dari pagu anggaran Rp 1.086.467.000 atau 98,36 %.

d. Realisasi keuangan Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi sebesar Rp 483.623.247 dari pagu anggaran Rp 600.992.000 atau 67,29

3. Realisasi keuangan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebelumnya Rp 7.724.252.603 menjadi Rp 7.693.305.311 dikarenakan adanya pengembalian belanja (contra post) atas Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp 30.957.292.

4. Hambatan dan tindak lanjut yang dilakukan sebagai berikut:

Sub Kegiatan	Hambatan	Tindak Lanjut	Keterangan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pengalokasian anggaran gaji dan tunjangan ASN belum sesuai dengan kebutuhan riil	Koordinasi dengan TAPD	Ketidaksesuaian ini mengakibatkan silpa yang besar
Perumusan Rekomendasi atas Rencana Penetapan Peraturan Baru dan/atau Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Peraturan	Keterbatasan waktu pelaksanaan	Koordinasi dengan Tim Sekretariat	
Penelitian dan Pengembangan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	a. Keterbatasan Waktu Pelaksanaan Kajian b. Koordinasi Lintas OPD yang Belum Optimal	Membentuk koordinasi lintas OPD melalui forum teknis atau tim pelaksana	
Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perikanan, Perkebunan dan Pangan	Keterbatasan waktu pelaksanaan	Koordinasi dengan Tim Sekretariat	
Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Keterbatasan waktu pelaksanaan	Koordinasi dengan Tim Sekretariat	
Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Penyusunan RIP/RD adanya evaluasi BRIN dengan menambahkan Rencana Aksi di BAB 7	Konsolidasi dan sinkronisasi Program Perangkat Daerah	
	Kurang sosialisasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah belum optimal	Peningkatan sosialisasi dan sinergitas antar Perangkat Daerah	Capaian Skor IKI Tahun 2025 sebesar 46,00 dengan kategori INOVATIF.
Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Tidak terpenuhinya dokumen persyaratan	Reach out pada pelaku UMKM	

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban terkait atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025. Penyusunan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Badan Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai, baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga disajikan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Riset dan Inovasi Daerah memiliki 2 (dua) sasaran strategis meliputi sasaran strategis Terpenuhinya Koordinasi dan Tata Kelola Administrasi Perkantoran tercapai sebesar 17 dokumen dari 17 dokumen target atau 100 % kategori atau interpretasi **Sangat Tinggi**. Sedangkan sasaran strategis Terpenuhinya Kelitbangan Penyelenggaraan Daerah yang memenuhi standar dan sesuai kebutuhan tercapai sebesar 6 dokumen dari 6 dokumen target atau 100,00 % kategori atau interpretasi **Sangat Tinggi**, Dengan demikian capaian kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah pada tahun 2025 dalam kategori atau interpretasi **Sangat Tinggi**.
2. Secara umum realisasi keuangan Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2025 sebesar Rp 15.393.704.894 dari pagu anggaran Rp 18.269.472.999 atau 87,85 %. Rincian realisasi keuangan berdasarkan program, sebagai berikut:

- Realisasi keuangan PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA sebesar Rp 9.657.591.952 dari pagu anggaran Rp 11.673.382.599 atau 85,31 %.
- Realisasi keuangan PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH sebesar Rp 3.426.112.942 dari pagu anggaran Rp 3.597.410.000 atau 95,24 %.

3. Faktor pendorong keberhasilan kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah yaitu arahan pimpinan dan koordinasi internal dengan stakeholder. Sedangkan faktor penghambat yaitu keterbatasan waktu pelaksanaan kajian.
4. Rekomendasi langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah antara lain:
   - Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran penyediaan gaji dan tunjangan ASN lebih cermat lagi.
   - Peningkatan kompetensi aparatur Badan Riset dan Inovasi Daerah.
   - Dilakukan rapat pengendalian pelaksanaan secara rutin.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Badan Riset dan Inovasi Daerah kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholder ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun.

Sangatta, Januari 2026
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah

Juliansyah, S.Hut
NIP 197207092001121001

LAMPIRAN

Lampiran Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah Tahun 2025

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Jaslensyah, S.Hut
Pangkat : Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP : 197307052001121001
Jabatan : Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Timur
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Ardiansyah Sulaiman
Jabatan : Bupati Kutai Timur
Selaku atasan langsung Pihak Pertama
Selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama pada tahun 2025 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dan pelanggaran ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sangatta, 4 November 2025

Pihak Kedua,
Bupati Kutai Timur

Ardiansyah Sulaiman

Pihak Pertama,
Kepala Badan

Jaslensyah, S.Hut
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 197307052001121001

Lanjutan

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Nilai SAKIP	62,5
2.	Terpenuhinya kelitbangan penyelenggaraan daerah yang memenuhi standar dan sesuai kebutuhan	Jumlah produk kelitbangan	6 Dokumen
3.	Terpenuhinya koordinasi dan tata kerja administrasi Perkantoran	Jumlah dokumen pelaksanaan koordinasi dan tata kerja administrasi perkantoran	17 Dokumen

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 11.873.062.998,-	
2.	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp. 3.587.410.000,-	

Sangatta, 6 November 2025

Pihak Kedua
Bupati Kutai Timur

Ardiansyah Sulaiman

Pihak Pertama
Kepala Badan

Jahanapih, S.Hut
Pembina Utama Muda (IVc)
NIP 197001082001121001